

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfiah, Ratna Nurul. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2006
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2000
- Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta. 1997
- Budi Wijayanto, *Fungsi dan Peranan Rumah Penyimpanan Benda-Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta, 1998
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkerditan*, Bandung: Alumni 1997
- Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012
- , *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014
- , *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 1998
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, 2005
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

- H.M.A Kuffal. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang. UMM Press. 2013
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003
- Joelman Subaidi, *Penyitaan Barang Dalam Hukum Acara Pidana*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- K. Bertens, *Pengantar Etika Hukum*, Jakarta, Penerbit Kanisius, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta. 2003
- Kolim, Noor. *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta. 2005
- Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta 2004
- Mudjirah, "*Pokok – pokok Kebijakan tentang Pengelolaan Basan dan Baran di RUP BASAN*", SinarGrafika, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung. 2004
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1989
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003
- Noor Kolim. *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*, Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005
- Philipus M. Hadjon (et,all), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1998

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1989

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1 .35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan

C. Internet

Barang-Sitaan-Berujung-Mangkrak, Diperoleh 08 mei 2016, dari <http://arsip.gatra.com/2016/majalah/artikel>

22-Mobil-Damkar-Sitaan-KPK-Mangkrak. Diperoleh tanggal 1 mei 2014, <http://nasional.sindonews.com/read/2012/08/12/13/665232/22-mobil-damkar-sitaan-kpkmangkrak>.